



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK**  
**KOMISI VI DPR RI**  
**KE BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**  
**TANGGAL 10 S.D 12 NOVEMBER 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**2022**



## **LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR-RI**

### **KE PT TASPEN (PERSERO)**

### **KE BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

### **PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023**

### **TANGGAL 10 S.D. 12 NOVEMBER 2022**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Kunjungan Kerja**

Undang-Undang No. 13/2019 dan pasal 60 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib mengatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat melakukan kunjungan kerja dalam masa sidang.

Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 – 2023.

### **B. Objek Kunjungan Kerja.**

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT Taspem (Persero) ke Bogor Provinsi Jawa Barat.

### C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Taspen (Persero), dalam rangka pengawasan terhadap program dan kinerja perusahaan di Bogor Provinsi Jawa Barat.

### D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Bogor Provinsi Jawa Barat ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan ke PT Taspen (Persero).

### E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Bogor Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No.	No. Anggota	Nama Anggota	Keterangan	Foto
1.	A-189	Aria Bima	Pimp./F-PDIP	
2.	A-33	Faisol Riza	Ketua/F-PKB	
3.	A-251	Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.	F-PDIP	

4.	A-181	Dr. Evita Nursanty, M. Sc.	F-PDIP	
5.	A-158	Sondang Tiar Debora Tampubolon	F-PDIP	
6.	A-305	H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.	F-PG	
7.	A-302	Nusron Wahid	F-PG	
8.	A-290	Budhy Setiawan	F-PG	
9.	A-131	Ir. H. La Tinro La Tunrung	F-PGerindra	
10.	A-135	Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.	F-PGerindra	
11.	A-115	Khilmi	F-PGerindra	
12.	A-353	H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.	F-Nasdem	
13.	A-396	Muhammad Rapsel Ali	F-Nasdem	
14.	A-374	H. Subardi, S.H., M.H.	F-Nasdem	

15.	A-36	IR. H. M. Nasim Khan	F-PKB	
16.	A-11	Tommy Kurniawan	F-PKB	
17.	A-523	Muslim, S.HI., M.M.	F-PD	
18.	A-554	Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Comm., M.Sc.	F-PD	
19.	A-416	Hj. Nevi Zuairina	F-PKS	
20.	A-409	Rafli	F-PKS	
21.	A-485	Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.	F-PAN	
22.	A-506	Abdul Hakim Bafagih	F-PAN	
23.	A-463	Elly Rachmat Yasin	F-PPP	

## **F. HASIL KUNJUNGAN**

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Bogor Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

### **PT Taspen (Persero)**

PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. PT TASPEN (Persero) merupakan BUMN didirikan pada 17 April 1963 sebagai pengelola program JAMINAN SOSIAL bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara.

Sebanyak 6,81 Juta dengan rincian peserta aktif 3,86 Juta dan pensiun 2,95 juta (per 31 oktober 2022) di 57 kantor cabang, 1.520 karyawan, 19.232 titik layanan dan 43 mitra bayar. Grup bisnis taspen life taspen properti dan mandiri taspen.

Wilayah Kerja Kantor Cabang Utama Bandung meliputi:

1. Cabang Bogor
2. Cabang Tasikmalaya
3. Cabang Cirebon
4. Cabang Bekasi
5. Cabang Depok

Jumlah karyawan 34 orang, Jumlah mitra bayar 13 mitra, Realisasi pembayaran manfaat pensiun Rp 2,9 Triliun dengan peserta aktif 65.748 dan pensiun 109.693.

#### **a. Kinerja Perseroan**

Aset Kelolaan Taspen Program Tunjangan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Akumulasi luran Pensiun dan entitas anak.

Di Tahun 2018: Rp231,87 T

Di Tahun 2019: Rp263,25 T

Di Tahun 2020: Rp287,39 T

Di Tahun 2021: Rp306,73 T

Taspen Tetap Membukukan Laba Positif Di Tengah Pandemi (tidak termasuk AIP) :

Di Tahun 2018: Rp271,55 M

Di Tahun 2019: Rp394,91 M

Di Tahun 2020 : Rp731,42 M

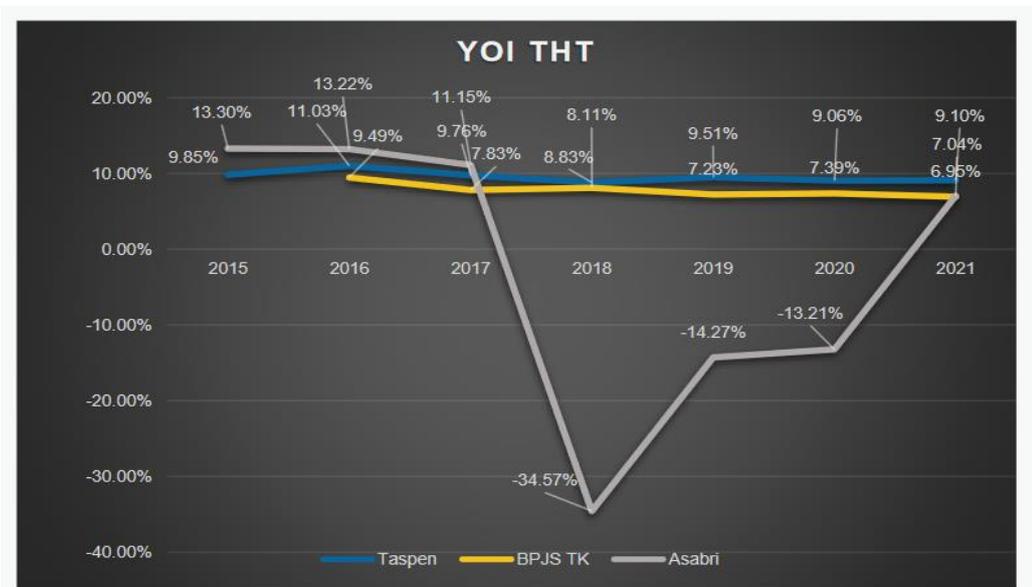
Di Tahun 2021: Rp377,61 M

❖ Investasi Taspen Dikelola Secara GCG Program THT dan AIP (Per September 2022) :

- 55,6% Obligasi Negara/Sukuk Negara
- 16,8% Obligasi Korporasi/Sukuk Korporasi
- 14,5% Deposito di Bank BUMN
- 7,3% Reksadana yang tercatat di OJK
- 4,0% Saham yang tercatat di BEI
- 1,8% Modal Anak Perusahaan/Afiliasi

❖ Hasil Investasi Taspen Lebih Tinggi Dibandingkan Industri

Rata-rata *Yield on Investment (YOI)* program THT TASPEN 6 tahun terakhir sebesar 9,59% -- YOI ini lebih tinggi daripada badan penyelenggara lain, meskipun sejak tahun 2016 beban klaim THT lebih tinggi daripada penerimaan iurannya.

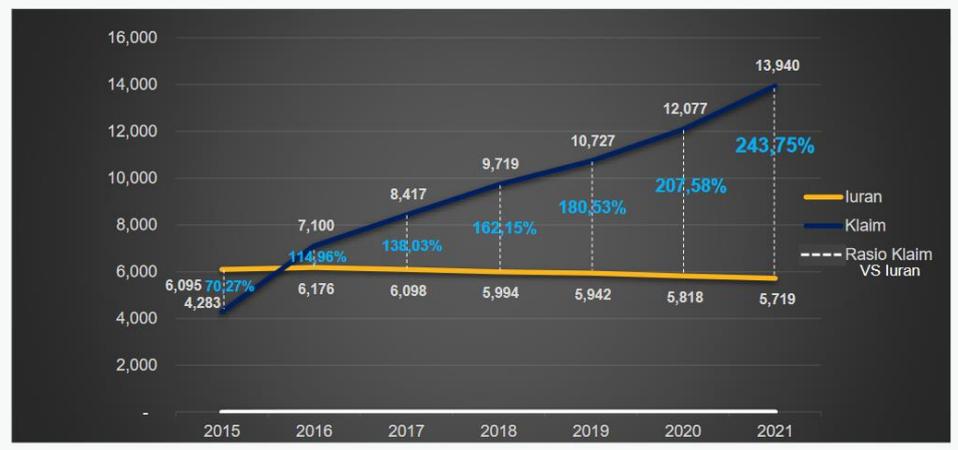


Sumber: Paparan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- ❖ Sejak 2016 Rasio Klaim Vs Iuran Program THT telah melampaui 100% dan terus meningkat

Sejak 2016, beban klaim Program THT telah melebihi penerimaan iuran.

Per 31 Desember 2021 Rasio Klaim vs iuran sudah mencapai 244%.



Sumber : Paparan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- ❖ Rasio Klaim vs Iuran Program THT

- Realisasi rasio klaim : Realisasi rasio klaim dari 2018 menunjukkan tren peningkatan.
- Proyeksi rasio klaim : Rasio klaim diproyeksikan meningkat >250%, karena peserta PNS didominasi oleh usia >50 tahun (35,7%) sehingga dalam 10 tahun ke depan pembayaran klaim pensiun akan tinggi.
- Realisasi iuran : Realisasi iuran menurun karena penambahan peserta aktif < peserta yang pensiun atau meninggal.
- Proyeksi iuran : Iuran diproyeksikan menurun, karena proyeksi penambahan peserta aktif < proyeksi peserta yang pensiun atau meninggal.

#### b. Layanan Taspen

Kebijakan Skema Pensiun *Pay As You Go*

TASPEN diamanahkan melaksanakan pembayaran Pensiun ASN sejak tanggal 1 Januari 1987 sesuai PP No 25 Tahun 1981 dan PMK No. 822/KMK.03/1986 menggunakan skema pay as you go.

luran Program Pensiun yang berasal dari peserta sebesar 4,75% dari penghasilan sebagai Akumulasi luran Pensiun (AIP) dikuasai Pemerintah dan dikelola oleh PT TASPEN (Persero)

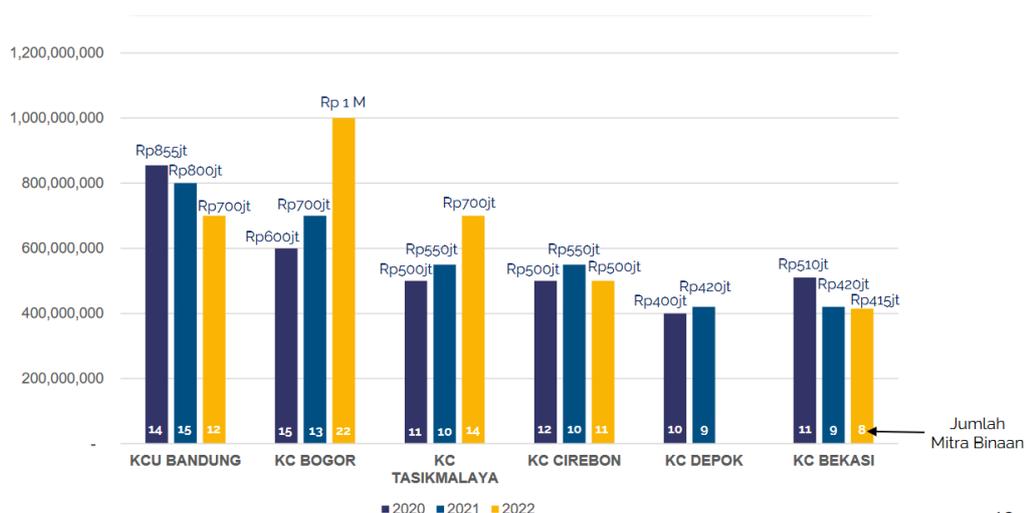
*“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

- Per 31 Desember 2021 Akumulasi luran Pensiun (AIP): Rp189,6 Triliun
- Per 31 Desember 2021 Realisasi Pembayaran Pensiun: Rp111,5 Triliun

c. Sinergi Taspem Dengan Pemerintah Daerah

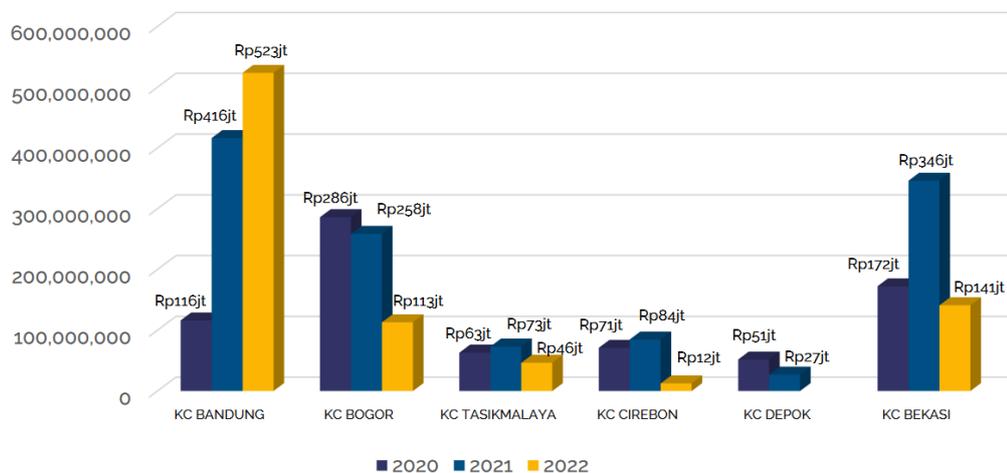
- Kerja Sama berbasis IT dengan pemanfaatan digitalisasi klaim melalui TOOS.
- Kepesertaan PPPK pada program TASPEN dan TASPEN Group
- Kerja Sama Layanan Service Point (Penempatan Pegawai TASPEN di PEMDA)
- Top Up Manfaat Hari Tua ASN melalui TASPEN Group
- Implementasi SIMGAJI dengan Pemda
- Ketepatan Pembayaran luran Peserta (IWP & luran JKK-JKM)
- Keikutsertaan Taspem Group pada Mall Pelayanan Publik (MPP)

d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)



Keterangan : Penyaluran Dana Kemitraan

#### e. Penyaluran Dana Non PUMK



#### G. REKOMENDASI DAN CATATAN

Dari pertemuan yang dilakukan kepada PT Taspen (Persero), pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik, ada beberapa rekomendasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asuransi Jasindo agar duduk bersama untuk membicarakan fasilitas asuransi kesehatan yang akan diberikan kepada anggota DPR RI setelah pensiun jabatan nantinya.
2. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) untuk lebih memaksimalkan layanan jasanya dan lebih meningkatkan profit perusahaan kedepannya.
3. Komisi VI DPR RI memberikan catatan kepada PT Taspen (Persero) untuk kedepannya dalam memberikan data papara, isi materi harus lebih lengkap dan jelas dalam memberikan informasi kinerja perusahaan dalam kunjungan kerja kedepannya.
4. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) untuk lebih meningkatkan *performance* perusahaan dan anak perusahaan agar lebih banyak lagi mendatangkan profit bagi perusahaan.

5. Komisi VI DPR RI memberikan catatan kepada PT Taspen (Persero) dalam mengelola grup bisnis taspen properti agar lebih diperhatikan lagi terkait untung rugi dalam kerjasama dengan pihak asing.
6. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) dalam kinerja perusahaan agar lebih memprioritaskan produk dalam negeri sesuai SNI.
7. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) untuk memperhatikan ketersediaan akses internet untuk didaerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
8. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) dalam menjalankan bisnisnya memiliki *roadmap* yang jelas, memiliki mitigasi dan skenario sebagai antisipasi resiko yang datang.
9. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) untuk bisa duduk bersama dalam membicarakan rencana bisnis tahunan perusahaan.
10. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) agar dalam memberikan manfaat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat agar bisa lebih tepat sasaran.
11. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Taspen (Persero) untuk bisa bersinergi dengan UMKM pembuat dodol kenzo agar bisa dibantu dipasarkan di puncak bogor.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
KE BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

**TTD.**

**ARIA BIMA  
A – 189**

H. DOKUMENTASI KEGIATAN



